



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

Nama : ATOK BARONI HIDAYAT

SENDIRI Rp. 230.000.000

2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**

3. NHK : 180127

II. DATA HARTA

Α.	TANAH DAN BANGUNAN					Rp.	1.278.475.440
	1.	Tanah dan Bangi	unan Seluas 1	105 m2/78 m	n2 di KAB /	KOTA	
5	BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 913.30		3.309. <mark>44</mark> 0	NO.	ON	JOK OK	

 Tanah dan Bangunan Seluas 168 m2/150 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN SERIBU, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 365.166.000

B.	ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	230.000.000

1. MOBIL, MITSUBITSHI OUTLANDER MINIBUS Tahun 2015, HASIL

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA			Rp.	16.500.000
D.	SURAT BERHARGA	Wall-	W.	Rp.	OK OH
E.	KAS DAN SETARA KAS			Rp.	9.300.000
J.F.	HARTA LAINNYA	al-	N.	Rp.	at all
	Sub Total	Kar	K	Rp.	1.534.275.440
III. HU	TANG			Rp.	215.857.656
IV. TO	TAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	VPI-	PI	Rp.	1.318.417.784

Catatan:

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.





